



Sultan Minta Sengketa Pilkada Dibawa ke MK

Selain menjaga iklim demokrasi, agar suasana Yogya sebagai kota wisata tetap terjaga.

Widiarsi Agustina
niniel@tempo.co.id

YOGYAKARTA — Raja Keraton yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta semua pihak membawa polemik penyelenggaraan dan hasil pemilihan kepala daerah di Kota Yogyakarta diselesaikan lewat jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi.

"Sebaiknya langsung ke Mahkamah Konstitusi saja. Semua pasangan calon kan memiliki hak lapor, asalkan punya dasar rasional," kata Sultan saat menjawab pertanyaan *Tempo* di Kepatihan, kemarin.

Kemarin, Komisi Pemilihan Umum Yogyakarta menggelar rapat pleno penetapan hasil suara pilkada Yogya. Tapi rapat diwarnai protes dan interupsi dari tim sukses Imam Priyono serta wakilnya, Achmad Fadli.

Di luar, pendukung Imam juga menggeruduk kantor KPU. Mereka berorasi di depan kantor yang gerbangnya ditutup dan dijaga ratusan polisi.

Komisi Pemilu sudah merampungkan rekapitulasi suara hingga Senin lalu. Hasilnya, pasangan Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi unggul tipis atas Imam Priyono-Achmad Fadli dengan selisih 0,6 persen atau 1.189 suara. Haryadi-Heroe merupakan jagoan koalisi Partai Golkar, PAN, PKS, Gerindra, dan Demokrat, dengan perolehan suara 50,30 persen. Adapun Imam-Fadli, kandidat yang diusung oleh PDIP dan PKB, memperoleh 49,70 persen suara.

Kubu Imam menyangsikan hasil perolehan suara itu dan menuding ada kejanggalan dalam rekapitulasi. Hal itu terkait dengan temuan 14 ribu lebih surat suara tak sah. Kubu Imam sehari-hari mendatangi kantor KPU untuk mempertanyakan hasil rekapitu-

lasi. Hal itu dilakukan hingga kemarin, ketika Komisi Pemilu menggelar rapat pleno penetapan hasil suara pilkada.

Sultan mengatakan tak menyoalkan aksi penggerahan pendukung untuk menolak hasil pilkada. Ia hanya mengingatkan aksi protes bisa dilakukan, asalkan tidak gaduh, merusak, dan anarkistis. Cara santun itu, menurut Sultan, penting untuk tetap menjaga iklim demokrasi selepas pilkada di Yogya. Juga agar suasana Yogya sebagai kota tujuan wisata tetap terjaga kondusif.

"Ruang-ruang demokrasi untuk menyampaikan aspirasi di Yogya kan dibuka lebar. Gunakan itu untuk menyampaikan aspirasi dengan benar dan tertib," ujar Sultan.

Rapat pleno penetapan hasil pilkada berlangsung "panas". Fokki Ardiyanto, saksi kubu Imam, menanyakan soal prosedur jadwal rekapitulasi surat suara di PPK. Ia mempertanyakan jumlah saksi di tingkat panitia pemilihan kecamatan dan undangan yang hanya disampaikan mendadak dan melalui pesan WhatsApp.

"Ada indikasi informasi rekapitulasi suara di PPK disampaikan lebih dulu terhadap saksi pasangan calon nomor dua," kata Fokki, yang juga menyatakan berkeberatan terhadap penafsiran PPK di Kota Gede dan Mantrijeron.

Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budiyanto mempersilakan PPK menjelaskan ihwal keberatan saksi itu. Juga saksi dari tim pasangan calon Haryadi-Heroe. Wawan juga menjelaskan semua tahapan pilkada telah disampaikan semua kepada tim penghubung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. "PPK tidak berpihak kepada pasangan calon tertentu," kata Wawan.

Imam kalah di Kecamatan Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Umbulharjo, dan Wirobrajan. Di Kecamatan Kraton, misalnya, calon nomor urut dua meraih 5.850 suara atau 53,3 persen. Sedangkan calon nomor urut satu mendapatkan 5.123 suara atau 46,7 persen. Kecamatan-kecamatan itu menjadi basis Haryadi-Heroe.

PRIBADI WICAKSONO | SHINTA MAHARANI

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005